Tafsir Resmi Versi Pemerintah di Indonesia

Sahlan Muhammad Faqih

UIN Sunan Gunung Djati Bandung sahlanfaqihalmultazim@gmail.com

Siti Pajriah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung sitifajryah01@gmail.com

Suggested Citation:

Faqih, Sahlan Muhammad dan Pajriah, Siti. (2021). Tafsir Resmi Versi Pemerintah. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 1, Nomor 2: pp 115–120. 10. http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i2.11472

Article's History:

Received February 2021; Revised April 2021; Accepted April 2021. 2021. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstrak:

Pada tahun 1965 *Terjemahan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama* dicetak yang terdiri dari tiga jilid. Pada masa pemerintahan orde baru, 1972, dibentuk tim ahli tafsir al-Qur'an. Tiga tahun setelahnya, 1975, diterbitkan untuk pertama kalinya karya tafsir sebanyak satu jilid dari tiga juz pertama al-Qur'an, hingga berlanjut sampai tahun 1980 karya tafsir ini lengkap sampai tiga puluh juz. Di samping itu, pemerintah melakukan pengayaan juga terhadap tafsir maupun terjemahan al-Qur'an menggunakan dialek lokal sebagai penambah khazanah al-Qur'an Indonesia. Contohnya *Terjemahan dan Tafsir al-Qur'an Bahasa Sunda* terbitan Pemerintah provinsi dan Kantor wilayah Depag Jawa Barat. Selain itu, Puslitbang Lektur Kemenag RI telah menerbitkan al-Qur'an terjemah dalam bahasa Sunda, bersamaan dengan itu diterbitkan pula al-Qur'an terjemah memakai 15 bahasa lokal lainnya. Penyusunan tafsir pemerintah mengalami perubahan yang beririsan dengan peralihan kekuasaan dari orde baru ke reformasi. Perubahannya tampak pada pendekatan tafsirnya yang beralih haluan dari metode *at-tahlîli* (deskriptif-analitis) dengan corak *hidâ'i* (hidayah), menjadi metode *maudû'i* (tematik) dengan corak *ilmî* (corak ilmiah).

Kata Kunci: Dialek Lokal, Depag, Orde Baru, Reformasi, Tafsir

Abstract:

In 1965 a translation of the Holy Koran of the Ministry of Religion was printed, consisting of three volumes. During the New Order government, 1972, a team of experts on the interpretation of the Koran was formed. Three years later, in 1975, published for the first time a volume of one-volume tafsir of the first three chapters of the Koran, 1980 this tafsir work was complete up to thirty juz. Also, the government also enriches the interpretation and translation of the Koran using local dialects and the treasury of the Indonesian Koran. For example, the translation and interpretation of the Sundanese Koran published by the provincial government and the West Java regional office of the Ministry of Religion. Besides, the Indonesian Ministry of Religion's Research and Development Center for Literature has published a translation of the Koran in Sundanese, along with the publication of a translated Koran using 15 other local languages. The formulation of the government's interpretation underwent changes that coincided with the transition of power from the New Order to the reformation. The difference is evident in the approach of its interpretation which has shifted from al-tahlîli (descriptive-analytical) with an hidâ'i (guidance) style to a method maudû'i (thematic) with an 'ilmî' (scientific) style.

Keywords: Local Dialect, Ministry of Religion, New Order, Reformasi, Tafsir

PENDAHULUAN

Turunnya Al-Qur'an di jazirah Arab tidak hanya untuk manusia setempat, namun ditujukan bagi seluruh Bani Adam di wilayah dunia manapun, tanpa membedakan bahasa maupun warna kulit. Sebagaimana adanya, al-Qur'an sebagai kitab petunjuk mengarahkan manusia pada kemanusiaan seutuhnya dengan tujuan menggapai keselamatan di dunia maupun akhirat. Hal ini tentu menjadi mustahil tatkala seseorang ingin menikmati hidayah al-Qur'an tanpa diberikan kesempatan untuk

memahaminya. Di antara cara memahaminya ialah dengan mengkaji al-Qur'an berdasarkan terjemahan maupun tafsirannya yang sudah dialihbahasakan.

Sekiranya memandang dari aspek kemaslahatannya, nyata sekali Indonesia di saat penduduknya mayoritas muslim, tentu mengalihbahasakan terjemah al-Qur'an maupun tafsirnya menjadi hal yang sangat diapresiasi. Maka berdasarkan kebutuhan ini, pemerintah menginisiasi dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) untuk membentuk tim penyusun dari Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an (selanjutnya akan dibaca LPMQ) dan Tim Penyempurna Tafsir. Setelah terbentuknya tim khusus untuk menangani kajian al-Qur'an terkhusus dalam kajian tafsirnya. Akhirnya pemerintah mampu menerbitkan karya-karya tafsir dengan berbagai metode penafsiran dan corak penafsiran yang relevan dengan zaman sekarang. Tentunya hal ini menjadi tambahan luar biasa bagi khazanah keilmuan tafsir di Indonesia.

METODE

Pada kesempatan ini, penulis akan menjelaskan makalah dengan judul "Tafsir Resmi Versi Pemerintah". Sebagai penunjang penelitiannya, penulis memakai metode kualitatif melalui pengambilan data dengan studi kepustakaan. Adapun pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif yang akan memberi gambaran target secara orisinal serta menggunakan pendekatan historis agar lebih mampu memotret peristiwa-peristiwa masa lalu secara terukur (Sukardi & Hutari, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Pengayaan Tafsir oleh Pemerintah

a. Pengayaan Tafsir Berbahasa Nasional

Khazanah keilmuan al-Qur'an dan tafsir di Indonesia diawali dengan munculnya karya pada pertengahan abad 17 M, Tarjuman al-Mustafid (Sukardi & Hutari, 2015). Kemudian diikuti jauh setelahnya oleh beberapa tokoh di tanah air baik sebelum masa kemerdekaan maupun setelahnya, di antaranya adalah:

- a) Tafsir al-Qur'an Indonesia (1922 M) karya Mahmud Yunus.
- b) Tafsir Qur'an al-Furqan (1928 M) karya Ahmad Hassan.
- c) Tafsir al-Qur'an (1959 M) karya Zainuddin Hamidi.
- d) Tafsir Qur'an Kariem (1960 M) karya Halim Hassan, dan sebagainya.

Selain penafsiran yang dilakukan oleh tokoh individual di Indonesia. Pemerintah pun ikut berupaya dalam menerbitkan lektur terjemahan al-Qur'an maupun tafsirannya. Semisal terjemahan al-Qur'an Depag RI yang pertama kali beredar tanggal 17 Agustus 1965. Terdiri dari tiga jilid yang dicetak bertahap dengan setiap jilidnya berisi sepuluh juz. Selanjutnya pada tahun 1971, cetakan al-Qur'an dan terjemahnya disusun menjadi satu jilid lengkap oleh lembaga yayasan yang menyelenggarakan terjemah maupun tafsir dari Depag RI yang dikepalai oleh Prof. Soenarjo kala itu. Selanjutnya atas usul Musyawarah Kerja Ulama al-Qur'an (MKUQ) ke-15 tahun 1989 M, al-Qur'an terjemahan yang sudah ada mengalami perkembangan, kemudian dikukuhkan oleh Puslitbang Lektur Agama bersama LPMQ (Sukardi & Hutari, 2015).

Upaya pemerintah dalam menghasilkan karya tafsir al-Qur'an, sangat tidak bisa dilepaskan dari ikhtiar pertama yang memakan waktu begitu lama dalam menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ditambah dengan antusiasme masyarakat terhadap cetakan terjemahan al-Quran yang terbit ketika itu. Sehingga muncul masukan dan kritik yang membangun kualitas al-Qur'an terjemah karya Depag.

Selanjutnya pemerintah mengupayakan lahirnya karya tafsir berbahasa nasional. Menteri Agama Mukti Ali, 1972 M, menyusun tim ahli yang dikenal dengan Dewan Penyelenggara Pentafsir Al-Qur'an dengan KMA no. 90 tahun 1972. Selanjutnya dikukuhkan dengan KMA no. 8 tahun 1973, lalu disempurnakan lagi dengan KMA no. 30 Tahun 1980 (Sukardi & Hutari, 2015).

Setelah dibentuk satu kerja penyusun yang pertama, tiga tahun setelahnya (tahun 1975) dicetak untuk pertama kalinya tafsir al-Qur'an dalam 1 jilid terdiri dari 3 juz pertama. Beberapa tahun setelahnya disusul dengan jilid-jilid lainnya, sehingga tafsir Depag ini bisa rampung 30 juz dengan format sederhana pada tahun 1980. Proses perbaikan terhadap karya tafsir ini terjadi beberapa kali, di antara perbaikan yang cukup banyak terjadi pada tahun 1990, namun tetap saja hanya perbaikan dalam aspek kebahasaan (B M Yunus, 2007). Walaupun demikian adanya, setelah karya tafsir Depag berkali-kali dicetak baik oleh lembaga penerbitan negara maupun swasta, tetap saja masyarakat menyambutnya dengan antusiasme yang luar biasa.

Penyempurnaan tafsir al-Quran yang dilakukan Depag tidak sampai disitu, hal ini ditegaskan dengan rapat MKUQ pada tahun 2003. Dari musyawarah ulama ini dicetuskan rekomendasi perlunya usaha penyempurnaan pada tafsir Depag, dan juga membuat pedoman pembaruan tafsir sebagai aturan kerja para ahli dalam melaksanakan kinerjanya, di antaranya agenda penyelesaiannya.

Menurut (D. A. RI, 2010) bagian-bagian yang diperbarui dalam menyempurnakan tafsir al-Quran meliputi:

- a) Kebahasaan, karena tidak relevan dengan penggunaan bahasa Indonesia di era kontemporer ini.
- b) Substansial yang berkaitan dengan kandungan dan makna ayat.
- c) Asbab nuzul dan munasabah.
- d) Menyempurnakan hadis pada aspek rawi dan sanad.
- e) Mengalihkan aksara berdasarkan Pedoman Transliterasi Arab-Latin.
- f) Menambah kajian ayat-ayat kosmik bekerja sama dengan tim pakar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

- g) Redaksi ayat Al-Qur'an memakai rasm 'Ustmaniy yang diambil dari mushhaf yang sudah memenuhi standarisasi.
- h) Menggunakan terjemahan ayat Al-Qur'an terbitan Depag.
- i) Menjelaskan glosari tertentu pada *maghza* ayat yang ditafsirkan.
- j) Menyediakan indeks pada akhir bagian setiap jilid.
- k) Memisahkan jenis *font* pada penyalinan teks bahasa Arab, antara *maghza* ayat yang ditafsirkan, ayat-ayat penunjang, potongan ayat dan penyalinan teks hadis.

Menindaklanjuti rekomendasi dari MKUQ, Menteri Agama pada tahun 2003 membentuk tim penyusun tafsir al-Qur'an. Mereka menargetkan setiap tahunnya tercapai 6 juz, sehingga dapat diprediksi akan selesai seutuhnya pada tahun 2007. Pada tahun 2004, diterbitkan 6 juz pertama, kemudian tahun 2005 diterbitkan 6 juz kedua, selanjutnya tahun 2006 diterbitkan 6 juz ketiga, selepas itu tahun 2007 diterbitkan 6 juz keempat. Bertepatan dengan dicetaknya bagian keempat tadi, revisi Tafsir Departemen Agama juz 25 s.d 30 telah rampung juga pada tahun yang sama, lalu diterbitkan tahun 2008 (D. A. RI, 2010).

Ketika diterbitkannya hasil penyusunan tafsir al-Quran secara bertahap setiap tahunnya, sengaja dicetak dengan jumlah terbatas sebagai langkah sosialisasi hasil revisi, agar mendapat saran dan masukan dari para ulama dan pakar ilmu tafsir. Hal ini dilalui beberapa kali pada sidang MKUQ pada tahun 2005 di Surabaya, tahun 2006 di Yogyakarta, terakhir pada tahun 2007 dan 2008 di Gorontalo. Di antara saran dan masukan yang direalisasikan yaitu memasukkan kajian ayatayat kosmik (kauniyah) yang erat hubungannya dengan dunia IPTEK. Sebagai upaya tegas dalam mencapai hal itu maka tim penyusun tafsir al-Qur'an, memasukkan satu kerja dari LIPI sebagai kolega dalam penyusunan tafsir al-Qur'an ini (D. A. RI, 2010).

Selain daripada karya tafsir dari tokoh-tokoh Islam berdarah pribumi maupun karya terjemahan al-Qur'an dan tafsirnya dari lembaga resmi berbasis pemerintah. Upaya-upaya penerbitan terjemah tafsir yang berbahasa Arab, maupun ilmu-ilmu al-Qur'annya ke dalam bahasa Indonesia, ikut menambah khazanah perkembangan tafsir di Indonesia. Di antaranya penerjemahan kitab *Tafsir Ibnu Katsir, Asas fit-Tafsir, Tafsir Jalalain, Tafsir al-Maraghi* dan *Asbabun Nuzul*. Termasuk pula di era modern ini lahir karya tafsir lengkap 30 juz dari guru besar tafsir di Indonesia, yaitu *Tafsir al-Mishbah* karya Quraish Shihab.

b. Pengayaan Tafsir dan Terjemah Al-Qur'an Berbahasa Lokal

Selain daripada karya tafsir pemerintah dengan menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Terdapat pula tafsir pemerintah dengan menggunakan bahasa lokal yang disusun oleh pejabat pemerintah setempat. Seperti tafsir berbahasa Sunda karya R.A.A. Wiranatakusumah V (1888-1965), bupati Bandung yang pernah menjabat menteri dalam negeri pada zaman orde lama, dalam penyusunannya ia diakomodasi R.A.A. Soeriamihadja. Tafsir ini berjudul *Tafsir Surat al-Baqoroh* yang disusun menggunakan aksara latin dalam bentuk *dangding/guguritan* dalam sastra sunda (Rohmana, 2016). Dan hanya karya Wiranatakusumah V ini yang memilih menyajikan tafsir Sundanya dengan nuansa puisi dari sastra Sunda itu sendiri. Penyajian yang artistik literer ini yang selanjutnya ditiru dalam terjemahan Nur Hidayah dan Nadoman Nurul Hikmah (Rohmana, 2014). Kemudian tafsir bahasa Sunda dalam satu jilid, *Terjemahan dan Tafsir al-Qur'an Bahasa Sunda* (1978), yang disusun oleh Depag-Pemprov Jawa Barat dengan tim ahlinya KH. Anwar Musaddad dkk. Sebelum dicanangkan proyek tafsir ini, Depag-Pemprov Jabar menerbitkan *Terjemah Al-Qur'an Bahasa Sunda* ke dalam bagian proyek PELITA 1974-1979 (Rohmana, 2015b).

Dilihat dari sistematika penulisannya terjemah al-Qur'an yang diterbitkan Depag-Pemprov Jabar, merupakan proyek dari penerjemahan *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Depag Rl. Proyek resmi terjemahan Al-Qur'an berbahasa lokal masih berlanjut hingga masa sekarang yang didukung dengan anggaran negara yang jumlahnya tidak sedikit (Rohmana, 2015). Tafsir bahasa Sunda Depag-Pemprov Jabar ini dalam penyusunan tafsirnya menggunakan pendekatan *bil-ra'y* (nalar logika) (Rahman, 2016) yang muatannya lebih didominasi kepentingan politik masa pemerintahan Orde Baru. Walaupun begitu dalam penyajiannya, tafsir ini selain memperkuat maknanya agar mudah difahami dan lebih meresap ke dalam hati, ungkapan dalam bahasa tradisionalnya lebih bermakna Islami sebab beririsan langsung dengan norma ajaran Islam (Rohmana, 2015). Setelah terbit pertama kali pada tahun 1978, tafsir versi pemerintah ini kemudian disempurnakan lagi pada tahun 1981/1982 dengan memakai judul *Tafsir al-Qur'an Basa Sunda* yang terdiri dari 6 jilid. Rampungnya penyusunan tafsir ini membutuhkan kisaran antara tahun 1974-1991, semenjak pemerintahan Gubernur Aa Kunaepi sampai masa Yogie S.M. Di antara tim penyusun ahli tafsirnya terdapat nama K.H. Mhd. Romli dan K.H. A. Musaddad yang tergabung di dalamnya. Kabarnya sejak tahun 2011, Pemprov Jabar sedang menyiapkan proyek baru dalam penyusunan kembali tafsir berbahasa Sunda (Rohmana, 2015).

Perhatian pemerintah lainnya terhadap khazanah al-Qur'an, tampak pula atensinya dalam penyusunan terjemah al-Qur'an terhadap bahasa lokal. Di antaranya *Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Sunda* yang diterbitkan oleh Puslitbang Lektur Kemenag RI 2018-2019. Selain terjemahan berbahasa Sunda, dalam pengantarnya Kepala Puslitbang Lektur menyampaikan bahwa penerbitan terjemahan al-Qur'an sudah dilakukan terhadap 15 bahasa daerah lainnya, yaitu bahasa Makassar, Kaili dan Sasak pada tahun 2012; bahasa Minang, Dayak Kanayatn dan Jawa Banyumasan pada tahun 2015; bahasa Batak Angkola, Toraja dan Bolaang Mongondow pada tahun 2016; bahasa Bali, Melayu Ambon dan Banjar pada tahun 2017; bahasa Aceh, Madura dan Bugis pada tahun 2018 (Rohmana, 2019).

c. Karya Tafsir pada Masa Orde Baru

Pada masa orde baru, dibentuk Dewan Penyelenggara Pentafsir Al-Qur'an (DPPQ), tim ahli tafsir yang diakomodir langsung oleh pemerintah, Depag. Setelah delapan tahun lamanya semenjak pembentukan tim penyusun tafsir, tahun 1980, lahirlah karya tafsir *Al-Qur'an dan Tafsirnya* yang resmi diterbitkan pemerintah lengkap 30 juz. Pada faktanya, tafsir ini mengalami beberapa kali revisi di tahun-tahun berikutnya dengan rentang waktu yang cukup panjang. Hanya saja, revisi-revisi yang diarahkan kepada karya tafsir *Al-Qur'an dan Tafsirnya* ini, tidak sampai merubah substansi penafsirannya pertama kali. Berdasarkan ketentuan ini, penulis mencoba mengkategorisasi metode dan corak penafsiran pada tafsir Kemenag cetakan tahun 2011 yang terdiri dari 10 jilid dengan edisi yang sudah disempurnakan.

Berdasarkan beberapa referensi, telah disepakati dalam penafsiran *Al-Qur'an dan Tafsirnya* menggunakan metode tafsir *at-tahlîli* (Izzan, 2011). Adapun corak penafsirannya, sebagaimana telah dijelaskan langsung oleh Ibrahim Hosen, la mengakui corak tafsir yang digunakan ialah corak *hidâ'i* (hidayah). Dengan corak *hidâ'i* ini, pada setiap bagian kesimpulan akhirnya tim penyusun Depag selalu berupaya mengetengahkan aspek-aspek hidayah dari ayat yang ditafsirkan (Maarif, 2017). Sebagaimana sudah diketahui sebelumnya dalam (D. A. RI, 2010). berkenaan dengan metode dan corak penafsiran pada tafsir al-Qur'an Kemenag. Penulis akan memberikan sebuah gambaran sederhana pada penafsiran surat al-Fatihah dalam beberapa poin berikut:

- 1) Diawali dengan penyebutan nama-nama al-Fatihah, tempat diturunkan dan jumlah ayatnya.
- 2) Pokok-pokok isi dari surat al-Fatihah diuraikan dengan rinci beserta ayat dalam surat tersebut. Di antaranya: akidah, ibadah, hukum, dan kisah.
- Ketika memasuki aspek penafsiran dimulai dengan menjelaskan kosa kata tertentu yang membutuhkan penjelasan lebih.
- 4) Menjelaskan penggunaan basmalah di dalam al-Fatihah dengan perbedaan para ulama di dalamnya ditinjau dari ilmu fikih.
- 5) Menjelaskan hikmah membaca basmalah.
- 6) Menjelaskan keniscayaan hari akhir menurut tinjauan filsafat.
- 7) Menjelaskan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam tentang hari akhir.
- 8) Menjelaskan kedudukan tauhid di dalam ibadah.
- 9) Menjelaskan pengaruh ibadah terhadap jiwa manusia.
- 10) Menjelaskan macam-macam hidayah, seperti yang dinukil dari Muhammad Abduh.
 - a) Hidayah naluri
 - b) Hidayah pancaindra
 - c) Hidayah akal
 - d) Hidayah agama
- 11) Memberikan kesimpulan pada akhir pembahasan dengan mengetengahkan aspek hidayah di dalamnya.

Penyajian tafsir dengan metode *at-tahlîli* ini akan membawa pembaca pada pembahasan-pembahasan yang bervariasi namun tidak tuntas, sehingga pembaca akan membutuhkan waktu dalam mengambil kesimpulan pada penafsiran setiap ayat. Hal tersebut sesungguhnya sudah dijelaskan pada *Mukadimah* tafsirnya yang dicetak satu jilid secara terpisah. Terkait aspek kelemahan menggunakan metode penafsiran *at-tahlîli*, yaitu seorang mufasir dalam pembahasannya akan terbawa dari suasana ayat yang dikajinya ke ranah lainnya seperti suasana fikih, bahasa, kalam dan seterusnya. Sehingga pembaca akan merasa sedang tidak membaca tafsir al-Qur'an (K. A. RI, 2016).

Penulis memuji konsistensi yang ditampilkan pada sajian tafsir cetakan Depag ini. Karena senantiasa melekatkan corak hidâ'i-nya sehingga aspek-aspek bermuatan hidayah selalu ditampilkan. Penulis pun berhipotesis terkait penggunaan corak hidâ'i pada kitab Al-Qur'an dan Tafsimya ini, sebagai sebuah langkah yang mesti dilakukan mufasir dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di masa kontemporer ini (Zulaiha, 2017). Selain itu, terdapat benang merah yang menghubungkan adanya pengaruh pemikiran Muhammad Abduh dalam penafsiran dengan spirit penyusunan tafsir Depag dengan corak hidâ'i ini. Muhammad Abduh mengkritisi penafsiran di masanya maupun karya tafsir di masa sebelumnya yang sudah menghilangkan fungsi primer al-Qur'an sebagai pintu hidayah bagi umat manusia (hudan lin-nâs) (Izzan, 2011).

Sekiranya pembaca ingin mengetahui substansi penafsiran pada tafsir yang diterbitkan Depag ini. Maka pembaca harus benar-benar memahami substansi penafsiran yang ada pada surat al-Fatihah. Karena dalam al-Fatihah sudah termuat kandungan asasi al-Qur'an dengan perinciannya tampak pada 113 surat lainnya. Sebagai contoh dasar, tim penyusun tafsir menjelaskan macam-macam hidayah yang diterima manusia secara panjang lebar di dalam surat al-Fatihah, isyarat ini menunjukkan nuansa hidâ'i yang dijelaskan di dalam tafsir ini begitu kental.

d. Karya Tafsir setelah Reformasi

Setelah berakhirnya masa orde baru, dilanjutkan dengan masa reformasi. Kementerian Agama melakukan usaha pembaruan tafsir lainnya sebagai jawaban yang dibutuhkan di masa kontemporer ini. Kali ini tim LPMQ di bawah Kemenag RI menjadikan metode tafsir berbasis maudhû'i (tematik) sebagai kajian tafsir yang ditawarkan. Langkah tim LPMQ menggunakan metode maudhû'i ini, karena banyak mufasir baik individu maupun lembaga/lajnah di masa kontemporer melihat kecocokan

penerapan metode ini sebagai sebuah kebutuhan zaman (Izzan, 2011). Terdapat dua alasan mendasar metode maudhû'i menarik minat para mufasir di era kontemporer ini, di antaranya:

- Metode ini berupaya menghadirkan makna ayat-ayat al-Qur'an sebagai sesuatu yang padu, alhasil seseorang akan memperoleh rancangan yang ditawarkan al-Qur'an secara utuh.
- Metode ini bersifat praktis karena bisa diterapkan secara langsung pada masyarakat, dan para mufasir dapat menentukkan tema-tema yang dikaji secara lebih mendalam.

Pada masa reformasi ini tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an cukup produktif dalam menghasilkan karya-karya berbasis tematik. Terhitung sebanyak 36 (tiga puluh enam) karya tafsir metode tematik dengan 15 (lima belas) di antaranya menggunakan corak tafsir ilmi yang berpadu dengan satuan kerja pakar LIPI (Izzan, 2011). Kemenag RI melalui lembaga LPMQ. Badan Litbang dan Diklat juga cukup banyak menelorkan karya dalam dunia khazanah tafsir. Di antaranya Tafsir Ilmi yang menawarkan kajian tafsir al-Qur'an yang dipadukan dengan perkembangan ilmu saintifik. Di antara kajiannya: Air dalam perspektif al-Qur'an dan Sains; Cahaya dalam perspektif al-Qur'an dan Sains; Fenomena kejiwaan manusia dalam perspektif al-Qur'an dan Sains; dan sebagainya.

Selain menghasilkan karya tafsir dengan tema utama Tafsir Ilmi, pada kajian tafsir lainnya Kemenag masuk ke dalam kajian Tafsir Tematik. Tafsir Tematik ini dihadirkan sebagai peremajaan wacana diskursus ajaran Islam dengan tujuan untuk konsumsi masyarakat modern. Di sisi lain, Tafsir Tematik ini berusaha mengupas sisi kehidupan yang berkaitan langsung dengan manusia dari sudut pandang al-Qur'an, di antara kajiannya: Hukum, Keadilan dan HAM; Etika Keluarga, Masyarakat, Politik; Kesehatan dalam al-Qur'an; Komunikasi dan Informasi; Pelestarian Lingkungan Hidup; Pembangunan Ekonomi Umat; Pembangunan Generasi Muda, Tanggung Jawab Sosial; Urgensi Berkeluarga; dan sebagainya.

Tidak sampai disitu, dalam penafsiran ayat-ayat Mutasyabihat yakni memiliki makna lain, yang membutuhkan penafsiran menggunakan ayat lain atau hadits penjelas (Badruzzaman M Yunus & Jamil, n.d.). Dalam kajian tafsir tematik ini hadir sebagai langkah purifikasi terhadap istilah-istilah tertentu di dalam ajaran Islam yang memiliki makna bercabang maupun terhadap istilah yang diselewengkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan kebenaran kelompoknya. Di antara kajiannya: Damai bersama al-Qur'an; Hubungan Antar Umat Beragama; Jihad, Makna dan Impelementasinya; Moderasi Islam; Qur'an dan Isu-isu Kontemporer; Qur'an dan Kebinekaan; Quran dan Kenegaraan; dan sebagainya. Sebagai contoh alasan diterbitkannya tafsir tematik ini oleh pemerintah, kami menukil dari satu judul tafsir tematik *Damai Bersama al-Qur'an*. Di dalam sambutannya Muchlish Hanafi, Ketua Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), menjelaskan bahwa kajian ini sebagai kritik terhadap aksi kekerasan dan terorisme yang muncul karena kesalahfahaman dalam memaknai ayat-ayat Al-Qur'an perihal jihad, perang/qital, serta amar makruf nahi mungkar. Tidak saja oleh kalangan nonmuslim, tetapi juga oleh sebagian orang Islam sendiri. Sebagian kalangan nonmuslim menganggap ayat-ayat perang dan jihad, atau mereka sebut dengan istilah "ayat-ayat pedang" (sword verses), adalah pemicu umat Islam untuk memusuhi dan memerangi mereka. Muncul stigma negatif bahwa agama Islam adalah agama yang disebarkan dengan pedang, bukan agama penebar kasih sayang dan kedamaian. Sedangkan, oleh sebagian umat Islam, ayat-ayat tersebut beserta hadis-hadis terkait (perintah jihad dan perang) dijadikan sandaran bolehnya seseorang melakukan teror ataupun tindak kekerasan atas nama agama (Wahid, 1998).

Pemahaman tersebut tentu saja keliru, menyalahi spirit ajaran agama Islam, tidak sejalan dengan misi utama diutusnya Nabi Muhammad sebagai *nabiy ar-raḥmah*, dan menyimpang dari pemaknaan ayat-ayat Al-Qur'an yang benar. Argumen yang dibangun dalam buku ini merujuk pada sumber-sumber yang otoritatif; dari kitab-kitab tafsir muktabar, hadis-hadis sahih dengan penjelasan dari kitab syarah hadis yang diakui, dan dilengkapi dengan pendapat ulama ahli di bidangnya (Hanafi, 2018). Bahkan kesalahpahaman umat Islam dalam memahami kandungan ayat al-Qur'an termasuk ke dalam aspek kebutaaksaraan (*ummiyyah*), sebagaimana argumentasi Rajab al-Bannā. Seorang penulis Mesir ini bahkan menyebutnya dengan istilah buta aksara agama. Rajab menilai, persona Islam dewasa ini tampak suram bukan hanya disebabkan oleh perang wacana yang dilakukan musuh-musuhnya, lebih dari itu berhubungan erat dengan tindak tanduk dan paradigma sekelompok minoritas muslim yang tidak memahami interpretasi agama dengan benar (Hanafi, 2018).

KESIMPULAN

Tafsir al-Qur'an resmi versi pemerintah muncul sebagai upaya pembinaan masyarakat yang beragama Islam. Sebelum perjalanannya sampai pada penyusunan karya tafsir, pemerintah menyusun terlebih dahulu karya terjemah al-Qur'an pada tahun 1965. Berselang beberapa tahun, pemerintah merencanakan pengayaan tafsir, dimulai dengan pembentukan tim ahli pada tahun 1972, hingga pada tahun 1980 tafsirnya sempurna 30 juz. Tidak berhenti sampai disitu, tafsir al-Qur'an Depag berkali-kali menerima banyak penyempurnaan dan saran dari para ulama dan cendekiawan. Pemerintah pun menyusun karya terjemah dan tafsir dengan menggunakan bahasa lokal, tujuannya agar lebih mudah diterima masyarakat Indonesia yang majemuk. Tercatat, pemerintah melalui Puslitbang Lektur Kemenag RI telah menerjemahkan al-Qur'an terhadap 16 bahasa daerah lainnya, satu di antaranya berbahasa Sunda. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Depag-nya menyusun buku tafsir berbahasa Sunda tahun 1978. Kemudian pada tahun 1981/1982, tafsir Sunda ini mengalami banyak perbaikan sehingga edisi ini diterbikan sebanyak 6 jilid. Dalam penggunaan metode penafsirannya, tafsir Kementerian Agama di masa orde baru menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan kontemporer. Hal ini tampak pada metode penafsiran klasik at-tahlîli (deskriptif-analitis) yang digabungkan corak penafsiran kontemporer bernuansa hidâ'i (hidayah). Setelah pergantian masa pemerintahan menjadi reformasi, Kementerian Agama memperbarui metode penafsirannya menjadi metode tafsir

maudhû'i (tematik), pada sebagian kajian tafsirnya bercorak tafsir 'ilmî (corak ilmiah). Pada masa reformasi ini cukup produktif, karya tafsir yang diterbitkan dengan metode tafsir tematik ini berjumlah sekitar 36 (tiga puluh enam) karya.

DAFTAR PUSTAKA

Hanafi, M. M. (2018). Damai Bersama Al-Qur'an. *Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI*.

Izzan, A. (2011). Metodologi Ilmu Tafsir. tafakur.

Maarif, N. H. (2017). MENGENAL KITAB AL-QUR'AN WA TAFSIRUHU DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA. SAMAWAT, 1(1).

Rahman, M. T. (2016). Rasionalitas Sebagai Basis Tafsir Tekstual (Kajian atas Pemikiran Muhammad Asad). *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 63–70.

RI, D. A. (2010). al-Qur'an dan Tafsirnya. Jakarta: Lentera Abadi.

RI, K. A. (2016). Al-qur'an dan Tafsirnya; Mukadimah.

Rohmana, J. A. (2014). Memahami al-Qur'an dengan Kearifan Lokal: Nuansa Budaya Sunda dalam Tafsir al-Qur'an berbahasa Sunda. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 3(1), 79–99.

Rohmana, J. A. (2015a). Perkembangan Kontemporer Tafsir di Indonesia: Gambaran Umum Tafsir Al-Qur'an di Tatar Sunda. Idea Press.

Rohmana, J. A. (2015b). Warisan Islam Lokal untuk Peradaban Islam Nusantara: Kontribusi Penafsiran al-Qur'ān di Tatar Sunda. *Refleksi*, *14*(1), 95–120.

Rohmana, J. A. (2016). Sastra Islam Nusantara: Puisi Guguritan Sunda dalam Tradisi Keilmuan Islam di Jawa Barat. *Akademika*, 21(1), 1–18.

Rohmana, J. A. (2019). Negosiasi, Ideologi, dan batas kesarjanaan: pengalaman penerjemah dalam proyek terjemahan Al-Qur'an Bahasa Sunda. *Suhuf*, *12*(1), 21–55.

Sukardi, H. M., & Hutari, F. (2015). Metode penelitian pendidikan tindakan kelas: implementasi dan pengembangannya.

Wahid, A. (1998). Islam Anti Kekerasan dan Transformasi Nasional, terj. M. Taufiq Rahman, Yogyakarta: LKiS.

Yunus, B M. (2007). Perkembangan Tafsir Al-Qur'an dari Klasik Hingga Modern. Pustaka Setia.

Yunus, Badruzzaman M, & Jamil, S. (n.d.). Penafsiran Ayat-Ayat Mutasyabihat Dalam Kitab Shafwah Al-Tafasir, ed. by Eni Zulaiha and M. *Taufiq Rahman (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020)*.

Zulaiha, E. (2017). Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1).



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).